

**TINGKAT DAN DISTRIBUSI PENDAPATAN RUMAHTANGGA TANI
DI PROYEK PERHUTANAN SOSIAL DI RPH JEBLOGAN,
KPH BOJONEGORO, JAWA TIMUR**

Oleh :

Abdul Ghofar*)

PENDAHULUAN

Latar Belakang Permasalahan

Menurut Alrasyid (1981), dewasa ini tidak kurang dari 20 persen lahan hutan di Indonesia dalam keadaan tidak produktif, dimana setengah dari lahan tersebut merupakan lahan kritis. Lahan tersebut bukan saja tidak mampu lagi berperan sebagai unsur produksi, tetapi sebaliknya telah menjadi penyebab terganggunya tata air yang menimbulkan berbagai bencana. Proses perusakan ini masih terus berlangsung dengan laju sekitar 400 000 hektar setiap tahun.

Dari hasil sensus tahun 1980 di sekitar hutan terdapat 0.5 juta orang buruh tani dan lebih dari 2 juta orang petani gurem yang juga biasanya menjadi buruh tani. Mereka merupakan petani marjinal yang lapar lahan garapan dan lapangan pekerjaan. Sedikitnya mereka menopang kehidupan bagi sekitar 12.5 juta jiwa yang untuk kelangsungan hidupnya masih banyak menggantungkan dari hasil hutan (BPS 1980).

Untuk mempertahankan tingkat kelestarian hutan, maka sejak tahun 1982 Perhutani yang mengelola hutan di Pulau Jawa sudah mulai dengan program Pembangunan Masyarakat Desa Hutan (PMDH). Program ini bertujuan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungannya sebagai bagian dari pembangunan perhutanan (Bratamihardja, 1987). Konsep ini merupakan penjabaran dari salah satu hasil perumusan Kongres Kehutanan Sedunia XVII tahun 1978 di Jakarta yang mengambil tema: "Hutan untuk masyarakat" (Forest for people). Dalam konsep ini sumberdaya hutan dan sumberdaya manusia perlu dibina agar interaksi antara keduanya dapat menghasilkan hutan yang baik dan lestari, masyarakat yang lebih sejahtera dan lingkungan yang serasi. Konsep ini secara operasional mendorong upaya pengelolaan hutan yang mencakup Perhutanan Sosial (Social Forestry).

*) Mahasiswa S₁ Jurusan Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian IPB di bawah bimbingan Dr. Ir. Sri Utami Kuntjoro.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sbb :

1. Melihat pengaruh program Perhutanan Sosial terhadap tingkat pendapatan rumahtangga tani pada masing-masing golongan pengusaha lahan.
2. Melihat pengaruh program Perhutanan Sosial terhadap tingkat kesejahteraan rumahtangga tani di kawasan hutan.
3. Menelaah dampak dari program Perhutanan Sosial terhadap distribusi pendapatan masing-masing golongan pengusaha lahan.

METODA PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Ngorogunung, Kecamatan Bubulan, Kabupaten Bojonegoro. Lokasi penelitian ini ditentukan secara sengaja (purposive), yaitu di wilayah RPH Jeblogan, BKPH Glebung, KPH Bojonegoro, Perum Perhutani Unit II Jawa Timur. Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus-Oktober 1991.

Metoda Pengambilan Contoh dan Jenis Data

Metoda yang digunakan untuk mengambil petani contoh adalah metoda "proportional stratified random sampling". Stratifikasi ini dilakukan berdasarkan golongan pengusaha lahan. Jumlah petani contoh sebanyak 58 orang, masing-masing 31 orang petani peserta program (pesanggem) dan 27 orang petani bukan peserta program.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari melalui wawancara langsung dari petani dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner). Sedangkan data sekunder diperoleh dari catatan petugas penyuluh lapangan perhutanan sosial (PLPS), kantor BKPH Clebung, KPH Bojonegoro, desa, kecamatan dan instansi yang terkait.

Metoda Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini disajikan dalam bentuk tabulasi, kemudian dianalisis secara deskriptif. Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah rumahtangga tani.

Pendapatan rumahtangga tani dianalisis dengan menghitung seluruh pendapatan yang diperoleh, baik dari kegiatan usahatani yang dilakukan dilahan perhutanan sosial, usahatani di lahan lain yang dikuasai dan dari sumber lain di luar kegiatan usahatani.

Tingkat kesejahteraan rumahtangga tani diukur dengan standar kebutuhan fisik minimum (KFM), yaitu nilai konsumsi sembilan bahan kebutuhan pokok dalam setahun. Analisis tingkat kesejahteraan ini juga diukur dengan konsep garis kemiskinan Sajogyo (1977). Sedangkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat dianalisis dengan kriteria Bank Dunia (World Bank) dan analisis Gini Ratio.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendapatan Rumahtangga Tani

Pada golongan penguasaan lahan di bawah 0.25 hektar (golongan I), pendapatan total rata-rata dari petani hutan (pesanggem) sebesar Rp 626 634 per tahun. Kontribusi terbesar diperoleh dari sumber lain sebesar Rp 442 066 atau 70.5 persen, kemudian dari kegiatan tumpangsari Perhutanan Sosial Rp 111 563 atau 17.8 persen, dan yang terkecil kontribusinya terhadap total pendapatan rumahtangga adalah dari kegiatan usahatani di lahan lain sebesar Rp 73 005 atau 11.7 persen. Sementara itu pada golongan I ini, pendapatan total rata-rata dari petani bukan peserta sebesar Rp 910 429 per tahun, dimana kontribusi terbesar diperoleh dari kegiatan pada sumber lain, yakni Rp 715 393 atau 78.6 persen, kemudian dari kegiatan usahatani di lahan non kehutanan sebesar Rp 195 036 atau 21.4 persen.

Pada golongan penguasaan lahan antara 0.25 - 0.50 hektar (golongan II), pendapatan total rata-rata petani hutan (pesanggem) sebesar Rp 1,085 508 per tahun. Kontribusi terbesar diperoleh dari kegiatan pada sumber lain, yakni sebesar Rp 580 893 atau 53.6 persen, kemudian dari kegiatan usahatani di lahan non kehutanan sebesar Rp 378 250 atau 34.8 persen, dan yang terkecil kontribusinya adalah dari kegiatan usahatani tumpangsari perhutanan sosial Rp 126 365 atau 11.6 persen. Sedangkan untuk petani bukan peserta, pendapatan total rata-rata sebesar Rp 820 207 per tahun, dimana kontribusi dari kegiatan usahatani di lahan non kehutanan sebesar Rp 408 457 atau 49.8 persen dan sebesar Rp 411 750 atau sebesar 50.2 persen berasal dari sumber lain.

Petani yang termasuk kedalam golongan penguasaan lahan di atas 0.50 hektar (golongan III), pendapatan rata-rata petani hutan (pesanggem) sebesar Rp 1 561 514 per tahun. Kontribusi terbesar diperoleh dari sumber lain sebesar Rp 700 226 atau 44.9 persen, kemudian dari kegiatan usahatani di lahan non kehutanan sebesar Rp 645 160 atau 41.3 persen, dan kontribusi terkecil diperoleh dari kegiatan tumpangsari perhutanan sosial sebesar Rp 216 128 atau 13.8 persen. Sedangkan petani bukan peserta, pendapatan total rata-rata rumahtangga sebesar Rp 1 405 414 pertahun, dimana Rp 582 914 atau 41.5 persen dari kegiatan usahatani di lahan non kehutanan dan sebesar Rp 822 500 atau 58 persen dari kegiatan sumber lain.

Secara keseluruhan pendapatan total dari tumpangsari perhutanan sosial pada masing-masing golongan penguasaan lahan, kontribusinya terhadap pendapatan total rumahtangga masing-masing sebesar 17.8 persen (golongan I), 11.6 persen (golongan II), dan 13.8 persen (golongan III). Kenyataan ini menunjukkan bahwa kegiatan tumpangsari perhutanan sosial masih belum mampu untuk diandalkan sebagai sumber pendapatan utama rumahtangga. Walaupun demikian, kegiatan tumpangsari yang dilakukan di lahan perhutanan sosial memberikan rasa aman dan menambah peluang bekerja bagi masyarakat sekitar hutan. Pendapatan total dari kegiatan usahatani di lahan luar kehutanan pada masing-masing golongan penguasaan lahan, menunjukkan semakin luas kegiatan usahatani yang dikelola berakibat semakin tinggi pula pendapatan yang diperoleh. Sedangkan kegiatan dari sumber lain pada masing-masing golongan penguasaan lahan, merupakan penyumbang terbesar terhadap total pendapatan rumahtangga (Tabel 1).

Tingkat Kemiskinan

Dari hasil rekapitulasi terhadap tingkat pendapatan per kapita per tahun, petani hutan (pesanggem) dalam golongan penguasaan lahan di bawah 0.25 hektar (golongan I) masih berada dalam keadaan miskin. Pendapatan per kapita per tahun pesanggem pada golongan ini sebesar Rp 140 072 atau 275.7 kilogram setara beras. Sementara itu petani hutan (pesanggem) dalam golongan penguasaan lahan antara 0.25 - 0.50 hektar (golongan II) dan di atas 0.50 hektar (golongan III), sudah mampu lepas diri keadaan kemiskinan, dimana pendapatan per kapita per tahun masing-masing sebesar Rp 281 428 atau 554.0 kilogram setara beras (golongan II), dan untuk golongan III sebesar Rp 325 315 atau 640 kilogram setara beras.

Sedangkan petani desa (non pesanggem) yang belum mampu terbatas dari kemiskinan adalah mereka yang termasuk kedalam golongan penguasaan lahan antara 0.25 - 0.50 hektar (golongan II), dimana pendapatan per kapita per tahun sebesar Rp 136 701 atau 269.1 kilogram setara beras. Untuk petani desa pada golongan penguasaan lahan di bawah 0.25 hektar (golongan I) dan di atas 0.50 hektar (golongan III) sudah terbatas dari keadaan kemiskinan, dimana pendapatan per kapita per tahun masing-masing sebesar Rp 199 156 atau 392.0 kilogram setara beras (golongan I) dan Rp 263 515 atau 518 kilogram setara beras (golongan III) (Tabel 2).

Pendapatan Bagi Kebutuhan Fisik Minimum

Kebutuhan fisik minimum (KFM) diukur berdasarkan besarnya biaya untuk memenuhi kebutuhan standar minimum, yakni biaya untuk membeli sembilan jenis bahan kebutuhan pokok selama setahun. Berdasarkan harga rata-rata yang berlaku di daerah penelitian pada periode bulan Agustus 1990, maka jumlah biaya bagi kebutuhan fisik tersebut sebesar Rp 131 400 (Tabel 3).

Pendapatan per kapita per tahun masing-masing sebesar 106:6 persen (golongan I), 214.1 persen (golongan II), dan 247.6 persen (golongan III) dari biaya kebutuhan fisik minimum. Sementara itu bagi petani desa (non pesanggem) pada semua golongan penguasaan lahan, juga telah mampu memenuhi kebutuhan fisik minimumnya. Pendapatan per tahun masing-masing sebesar 151.6 persen (golongan I), 103.0 persen (golongan II), dan 200.6 persen (golongan III) terhadap pemenuhan bagi kebutuhan fisik minimum.

Distribusi Pendapatan

Dari hasil rekapitulasi pendapatan total rumahtangga menunjukkan bahwa 40 persen petani hutan (pesanggem) yang berpendapatan rendah (kelompok I sampai dengan IV), menguasai bagian pendapatan dari kegiatan tumpangsari perhutanan sosial sebesar 16.4 persen. Bila dilihat dari total pendapatan sebesar 15.3 persen dari seluruh pendapatan masyarakat. Keadaan ini menunjukkan tingkat kepingcangan distribusi pendapatan yang sedang.

Distribusi pendapatan dari kegiatan *agroforestry* lebih baik daripada distribusi pendapatan total rumahtangga. Hal ini disebabkan rata-rata kegiatan *agroforestry* yang dikelola oleh masing-masing petani hutan (pesanggem) seluas 0.25 hektar, dan juga kegiatan *agroforestry*nya seragam, sehingga pendapatan yang diperoleh dari kegiatan *agroforestry* ini relatif hampir sama. Sedangkan untuk total pendapatan rumahtangga, sumber pendapatan dari kegiatan usahatani non *agroforestry* dan sumber lain masing-masing petani hutan (pesanggem) mengakibatkan disparitas pendapatan yang semakin besar.

Sementara itu keadaan distribusi pendapatan dari petani desa (non pesanggem) tercantum dalam tabel 6. Dari hasil perhitungan terlihat bahwa petani desa yang termasuk kedalam kelompok berpendapatan rendah (kelompok I sampai dengan IV), menguasai bagian pendapatan dari kegiatan usahatani sebesar 13.2 persen dari seluruh pendapatan masyarakat. Bila dilihat dari total pendapatan rumahtangga, keadaan distribusi masyarakat lebih baik, dimana kelompok petani yang berpendapatan rendah menguasai bagian pendapatan sebesar 15.2 persen. Keadaan ini menunjukkan tingkat kepingcangan pendapatan yang sedang. Buruknya distribusi pendapatan dari kegiatan usahatani ini disebabkan tingkat pengelolaan masing-masing petani berbeda dalam penggunaan teknologi usahataninya. Perbedaan ini berakibat produksi usahatani yang diperoleh masing-masing petani berbeda. Bila dilihat dari distribusi pendapatan total rumahtangga, keadaan kepingcangan distribusi pendapatan lebih baik. Hasil ini disebabkan rumahtangga yang berlahan sempit mempunyai kesempatan yang lebih luas untuk menambah pendapatan dari sumber lain dikarenakan kegiatan usahataninya tidak terlalu mengikat.

Dari hasil perhitungan dari nilai gini rasio menunjukkan bahwa tingkat distribusi pendapatan petani hutan (pesanggem), petani desa (non pesanggem) dan dari keseluruhan petani, memiliki tingkat distribusi yang merata, dimana nilai gini rasio masing-

masing sebesar 0.3646, 0.3534 dan 0.3547. Besarnya nilai gini rasio dari petani hutan (pesanggem) dibandingkan nilai gini rasio dari petani desa (non pesanggem) maupun dari keseluruhan petani, menunjukkan tingkat distribusi pendapatan yang relatif tidak merata dari petani hutan (pesanggem). Hal ini dikarenakan banyak petani hutan (pesanggem) yang tidak mempunyai lahan garapan (tunakisma) selain andil garapan di lahan Perhutanan Sosial (PS). Program Perhutanan Sosial (PS) walaupun menambah pendapatan bagi semua petani pada masing-masing golongan penguasaan lahan, tetapi mengakibatkan disparitas pendapatan yang semakin besar. Kondisi ini dikarenakan petani berlahan luas lah yang lebih menikmati tambahan pendapatan dari program ini. Dengan demikian pendapatan total rumahtangga berlahan luas akan jauh lebih besar akibat adanya tambahan dari kegiatan *agroforestry*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Kegiatan *agroforestry* yang dilakukan oleh petani hutan (pesanggem) sangat membantu dalam meningkatkan pendapatan keluarga tani. Disamping itu menambah peluang bekerja bagi pesanggem, tetapi belum dapat diandalkan sebagai sumber nafkah utama.
2. Tingkat kesejahteraan dari petani hutan (pesanggem) lebih baik dibandingkan dengan petani desa (non pesanggem).
3. Kontribusi pendapatan dari kegiatan *agroforestry* yang dilakukan di lahan Perhutanan Sosial bagi penumbuhan kebutuhan fisik minimumnya, sebesar masing-masing 19.0 persen untuk golongan I, 24.9 persen untuk golongan II dan sebesar 34.3 persen untuk golongan III.
4. Program Perhutanan Sosial mengakibatkan tingkat disparitas distribusi pendapatan yang lebih besar.

Saran

1. Memperbaiki Sistem Kelembagaan

Agar tingkat kesejahteraan dari petani hutan (pesanggem) dapat ditingkatkan, maka perlu adanya perbaikan dalam sistem kelembagaan. Kelembagaan yang dimaksud adalah dalam pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan kegiatan *agroforestry*. Upaya ini dapat dilakukan dengan memberikan bimbingan dan pengarahan yang intensif tentang cara-cara pengelolaan *agroindustry* terhadap anggota kelompok tani hutan (KTH).

2. Membuka Kesempatan Kerja Baru

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani hutan (pesanggem), diperlukan adanya pengembangan diversifikasi usaha bagi anggota kelompok tani hutan (KTH) sebagai sumber pendapatannya. Diversifikasi usaha ini dapat dilakukan dengan membina anggota kelompok tani hutan (KTH) dalam bidang keterampilan, agar mereka dapat mengolah bahan baku yang banyak tersedia (akar, tunggak, gembol jati) menjadi barang yang lebih berguna.

Anggota kelompok tani hutan (KTH) dalam mengelola kegiatan *agroindustry* dapat juga menanam jenis rumput-rumputan yang diperlukan bagi makanan ternak. Penerapan sistem ini dapat mendorong anggota KTH untuk beternak dengan sistem kandang, sehingga kerusakan hutan sebagai akibat penggembalaan liar dapat dihindarkan. Pada umumnya petani hutan (pesanggem) kekurangan modal. Pihak kehutanan diharapkan sebagai bapak angkat bagi KTH dalam penyediaan modal, sehingga pelaksanaan kegiatan peternakan dan sektor keterampilan sebagai lapangan kerja baru dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Alrasyid. 1981. Manajemen Sumber Bahan Baku Untuk Menunjang Kelestarian Industri Perkayuan. Proceeding Diskusi Perkayuan. Balai Penelitian Hasil Hutan.
- Biro Pusat Statistik. 1980. Penduduk Indonesia, Biro Pusat Statistik Tahun 1980. Jakarta.
- Bratamihardja, M. 1987. Pelaksanaan Program Social Forestry (Perhutanan Sosial) di Perum Perhutani, dalam : Bunga Rampai Perhutanan Sosial. Buku IV. Perum Perhutani. Departemen Kehutanan. Jakarta.
- Sajogyo, 1977. Garis Kemiskinan dan Kebutuhan Minimum Pangan. LPSP Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Tabel 1. Rata-rata Pendapatan Rumahtangga Tani Per Tahun Di RPH Jeblogan, BKPH Clebung, KPH Bojonegoro, Desa Ngorogunung Tahun 1990.

Sumber Pendapatan	Pendapatan (Rupiah)			
	Peserta	Persen	Bukan Peserta	Persen
<u>Golongan I</u>				
a. Tumpang Sari PS	111 563	17.8	-	-
b. Usahatani	73 005	11.7	195 036	21.4
c. Sumber lain	442 066	70.5	715 393	78.6
Jumlah	626 634	100.0	910 429	100.0
<u>Golongan II</u>				
a. Tumpang Sari PS	126 365	11.6	-	-
b. Usahatani	378 250	34.8	408 457	49.8
c. Sumber lain	580 893	53.6	411 750	50.2
Jumlah	1 085 508	100.0	820 207	100.0
<u>Golongan III</u>				
a. Tumpang Sari PS	216 128	13.8	-	-
b. Usahatani	645 160	41.3	582 914	41.5
c. Sumber lain	700 226	44.9	822 500	58.5
Jumlah	1 561 514	100.00	1 405 414	100.0

Sumber : Data Primer diolah.

Tabel 2. Pendapatan Per Kapita Per Tahun Rumah tangga Tani Di
RPH Jeblogan, BKPH Clebung, KPH Bojonegoro, Desa
Ngorogunung Tahun 1990.

Sumber Pendapatan	Petani Hutan (Pesanggem)		Petani Desa	
	Rupiah	Setara beras (kg)	Rupiah Bukan Pes	Setara beras (kg)
<u>Golongan I</u>				
a. Usahatani Agroforestry	24.938	49,1	-	-
b. Usahatani non Agroforestry	16.319	32,1	42.664	84,0
c. Sumber lain	98.815	194,5	156.492	308,0
Junlah	140.072	275,7	199.156	392,0
<u>Golongan II</u>				
a. Usahatani agroforestry	32.761	64,5	-	-
b. Usahatani non agroforestry	98.065	193,0	68.076	134,0
c. Sumber lain	150.602	296,5	68,625	135,1
Junlah	281.428	554,0	136.701	269,1
<u>Golongan III</u>				
a. Usahatani agroforestry	45.027	88,6	-	-
b. Usahatani non agroforestry	134.408	264,6	109.296	215,1
c. Sumber lain	145.880	287,2	154.219	303,6
Junlah	325.315	640,40	263.515	518,7

Sumber : Data Primer diolah